

FORMS AND STAGES OF COMMUNITY PARTICIPATION IN THE JOINT BUSINESS GROUP (KUBE) ALKESA LESTARI CIPEDAK JAGAKARSA SOUTH JAKARTA

BENTUK DAN TANGGA PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) ALKESA LESTARI CIPEDAK JAGAKARSA JAKARTA SELATAN

Lifya Afrianti Hanum¹, Muhtadi²

^{1,2}UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email Correspondence: lifyaafrianti0104@gmail.com

ABSTRACT :

This research on Community Participation in the KUBE Program at the Alkesa Lestari Joint Business Group (KUBE) Cipadak, Jagakarsa, South Jakarta discusses how community participation in the KUBE program which is one of the work programs of the Ministry of Social Affairs, also discusses the forms and steps of community participation in running business programs at KUBE Alkesa Lestari. This research uses a qualitative approach with descriptive methods described by written words and numbers. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The theory used explains the form and ladder of community participation. The results of the research show that from the planning stage members have not been involved. The implementation stage of the community has contributed well in running the KUBE program. The institutionalization stage of member participation has been well involved. The monitoring and evaluation stage of KUBE Alkesa Lestari members are still not involved but can be involved by providing assessments and suggestions for the KUBE program.

Keywords: *Form of Participation, Joint Business Group, Community Participation, Ladder of Participation*

ABSTRAK :

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat pada Program KUBE di Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Alkesa Lestari Cipadak, Jagakarsa, Jakarta Selatan ini membahas tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam program KUBE yang merupakan salah satu program kerja Kementerian Sosial, juga membahas tentang bentuk dan tangga partisipasi masyarakat dalam menjalankan program usaha di KUBE Alkesa Lestari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang digambarkan dengan kata-kata tertulis dan angka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang dipakai menjelaskan tentang bentuk dan tangga partisipasi masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari tahap perencanaan anggota belum terlibat. Tahap pelaksanaan masyarakat sudah berkontribusi dengan baik dalam menjalankan program KUBE. Tahap pelembagaan partisipasi anggota sudah terlibat dengan baik. Tahap monitoring dan evaluasi anggota KUBE Alkesa Lestari masih belum dilibatkan namun dapat terlibat dengan memberikan penilaian dan saran terhadap program KUBE.

Kata Kunci : *Bentuk Partisipasi, Kelompok Usaha Bersama, Partisipasi Masyarakat, Tangga Partisipasi*

Article Info

Received	:	18 Mei 2023
Accepted	:	January 2024
Published	:	January 2024
DOI	:	

Copyright and License

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan kultural yang multi dimensi, mencakup di dalamnya masalah politik, sosial, ekonomi, aset dan sumber daya alam, psikologi, dan lain-lain. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi masyarakat yang berada dalam situasi rentan, tak berdaya, terisolasi, dan tidak mampu untuk menyampaikan aspirasinya.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Dalam arti lain kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan banyak mengundang perhatian. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. (Suharto, 2005)

Adanya upaya penanggulangan kemiskinan sesungguhnya diharapkan terjadi perubahan yang lebih baik dari kondisi awal sehingga masyarakat mampu membebaskan kehidupannya dari keterbelakangan, Keterisolasian, kebodohan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan. Kondisi yang lebih baik pada dasarnya mencakup keseluruhan segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karenanya, pembangunan yang dilakukan selama ini tidak saja mencakup arti peningkatan taraf hidup secara ekonomis saja tetapi juga dalam segi kehidupan lainnya baik sosial ekonomi budaya dan yang tak kalah pentingnya adalah kelestarian alam.

Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus dijalankan sesuai dengan amanah peraturan perundangan. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan mencakup aspek yang sangat luas, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan politik. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diperlukan langkah-langkah untuk penguatan kelembagaan, baik lembaga kemasyarakatan, lembaga fungsional, maupun lembaga perekonomian. Lembaga yang sehat dan kuat menjadi modal utama dalam mengembangkan sumber daya manusia, karena melalui lembaga proses pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif. Di samping itu dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan profesional dalam pemberdayaan masyarakat. (Bhinadi, 2017)

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara berkelompok. Penanggulangan kemiskinan berbasis program kelompok yang dilakukan masyarakat memerlukan sinergi yang kokoh dan terarah dari pemangku kepentingan dalam bidang tersebut, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat sendiri. Salah satu program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah tersebut adalah program pengembangan usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama (KUBE).

Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat untuk melaksanakan dan terlibat dalam proses pembangunan dalam bentuk penyampaian pendapat barang keterampilan dan jasa. Masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui masalah yang sedang dihadapi dan kebutuhan yang diperlukan. Masyarakat akan mampu menyelesaikan masalah dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu masyarakat dianggap mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas untuk mencapai sasaran pembangunan masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Suatu program dinyatakan berhasil apabila masyarakat yang bersangkutan ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan pemerintah melalui program yang telah ditetapkan, salah satunya adalah program KUBE.

Salah satu kelompok yang mendapatkan bantuan pemerintah melalui program KUBE adalah Kelompok Usaha Bersama Alkesa Lestari yang terletak di Jalan Kavling Kompleks DKI Gang Risin No. 10A RT.005 RW.03 Cipadak Jagakarsa kota Jakarta Selatan. KUBE Alkesa Lestari ini beranggotakan 10 anggota tetap dengan ibu Mardiah yang merupakan perintis sekaligus ketua KUBE Alkesa Lestari. Selain para anggota dapat meningkatkan keterampilan, pembinaan, dan pelatihan kemandirian, penulis ingin melihat bagaimana partisipasi dan keaktifan mereka dalam mengikuti berbagai kegiatan dalam program Kube alkesa Lestari ini. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana partisipasi anggota KUBE Alkesa Lestari dengan dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan pendapatan dan cara berpikir yang berbeda-beda.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana partisipasi dan keaktifan yang dilakukan para anggota KUBE dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam program. KUBE Alkesa Lestari dipilih karena keberhasilannya melakukan pemberdayaan ekonomi sangat cocok untuk diterapkan di kawasan-kawasan lain di Indonesia.

Pemberdayaan atau *empowerment* diartikan sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki masyarakat agar menjadi sebuah sistem yang bisa mengorganisasi diri mereka secara mandiri. Individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku yang mampu mengarahkan diri mereka sendiri ke arah yang lebih baik. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. (Suharto, 2005). Menurut (Hermansyah, 2016) terdapat empat tahapan yang wajib dilalui dalam pemberdayaan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelembagaan, dan tahap mentoring dan evaluasi.

Partisipasi berarti memberi sumbangan dan turut menentukan arah atau tujuan pembangunan, di mana ditekankan bahwa partisipasi itu adalah hak dan kewajiban bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk-bentuk partisipasi menurut Keith Davis (1988) meliputi pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, barang, dan uang. Tangga partisipasi menurut Arnstein (Chambers, 2018), dibagi menjadi delapan tingkat, yaitu *citizen control*, *delegated power*, *partnership*, *placation*, *consultation*, *informing*, *therapy*, dan *manipulation*. Jenjang partisipasi masyarakat dapat direncanakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan tertentu. Tangga partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kata “partisipasi” dapat digunakan untuk aktivitas dan hubungan yang berbeda.

Program adalah sederetan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok organisasi, lembaga, bahkan negara. (Arikunto, 2002) Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan rancangan. Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumberdaya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kelompok merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Kelompok dapat juga diartikan sebagai himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling memengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. (Soekanto, 2013) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok usaha binaan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dibentuk dari beberapa keluarga binaan sosial untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif dan usaha kesejahteraan sosial dalam rangka kemandirian usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

2. METODE

Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln (Moloeng, 2007) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif yaitu berbagai macam metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. (Sukmadinata, 2012).

Subjek dari penelitian ini adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Alkesa Lestari beserta seluruh elemen yang terlibat dalam proses pengelolaan kelompok. Sedangkan yang dijadikan objek penelitian adalah proses partisipasi dan pengelolaan kelompok sebagai wujud dari civil society yang peduli terhadap pentingnya keterampilan dalam berwirausaha. Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Alkesa Lestari. Masa waktu penelitian dilakukan selama bulan yang dimulai dari bulan Agustus- Nopember 2022.

Sumber data yang akan ditelusuri untuk memperoleh data lapangan terdiri dua sumber, yaitu : Sumber Data Primer. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber yang akan diteliti dengan cara wawancara mendalam. Sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini, seperti buku-buku, catatan-catatan, transkrip, serta dokumen yang lainnya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti mengamati langsung objek yang diteliti. Observasi hakikatnya bentuk dari kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, dan pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Dalam penelitian ini, observasi dilaksanakan pada kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Alkesa Lestari. Peneliti melihat, mencatat, dan mendokumentasikan semua hal yang peneliti temui di lapangan dengan lengkap dan jelas sesuai dengan yang penulis lihat. Kedua, wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden secara lisan terutama untuk responden yang tidak dapat membaca atau menulis atau sejenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari pewawancara.

Ketiga, Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. (Arikunto, 2006). Peneliti melakukan mengambil gambar selama proses penelitian itu berlangsung untuk memberikan bukti secara riil sebagaimana kondisi di lapangan terkait permasalahan yang ada dalam masyarakat. Arsip-arsip dan data-data lainnya digunakan untuk mendukung data yang ada dari hasil observasi. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan saat penelitian dan sesudah penelitian. Analisis data saat penelitian dilakukan dengan cara proses pemilihan, pemusatan perhatian serta pengelompokan data yang lebih terfokuskan. Sedangkan analisis data setelah penelitian

dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut dideskripsikan dan direlevansikan dengan teori yang ada. Dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik validasi keabsahan data berfungsi sebagai menjaga kebenaran dalam isi data yang telah didapat. Di sini peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah cara untuk mengecek kebenaran (*truthworthiness*) dan pemeriksaan silang atau *check & recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Adapun langkah operasionalnya dapat dilakukan sebagai berikut: a). Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara. b). Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. c). Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang penelitian. d). Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dari berbagai kalangan seperti orang biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, dan orang pemerintahan.

3. PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Partisipasi dalam Tahap Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pemberian ide atau gagasan yang menyangkut kepentingan bersama dalam pencapaian program KUBE Alkesa Lestari. Indikatornya dapat dilihat dari partisipasi warga masyarakat dalam musyawarah penetapan program, identifikasi masalah, atau perumusan kegiatan/program masyarakat. *Participation of the mind*, yaitu keterlibatan mental atau pemikiran dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan kontribusi kepada kelompok dalam upaya mencapai suatu tujuan dan memikul tanggung jawab atas usaha yang bersangkutan.

Pada tahun 2012, saat perencanaan program KUBE di Jagakarsa sedang berjalan, terdapat 14 kelompok KUBE dari seluruh wilayah Jagakarsa di bawah naungan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam merencanakan program KUBE, setiap ketua kelompok dan anggotanya diharapkan dapat memberikan inspirasi, pemikiran dan masukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah pertemuan pertama Dinas Sosial yang berlangsung di Kecamatan Jagakarsa, 14 KUBE yang telah terbentuk memulai usahanya. Setiap KUBE memulai beberapa program dan membentuk strukturnya sendiri, termasuk KUBE Alkesa Lestari. Disinilah terjadi partisipasi anggota komunitas KUBE dalam perencanaan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk pemikiran, gagasan dan gagasan, partisipasi juga dapat berupa keahlian, barang dan uang. Namun pada saat merencanakan program KUBE di rumah ketua, anggota KUBE Alkesa Lestari hanya mengikuti arahan ketua KUBE.

3.2. Bentuk Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, keikutsertaan anggota KUBE Alkesa Lestari terbagi menjadi tiga yaitu pelaksanaan dalam kegiatan pelatihan, pelaksanaan dalam kegiatan pendampingan, dan pelaksanaan dalam kegiatan produksi.

Pertama, implementasi dalam kegiatan pelatihan. Bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah partisipasi masyarakat dalam berbagai macam sosialisasi yang telah disiapkan pemerintah untuk masyarakat setempat, salah satunya melalui bakti sosial. Adanya bentuk partisipasi yang besar dan keinginan masyarakat untuk berkontribusi memang patut diacungi jempol. Keikutsertaan dalam pelatihan anggota KUBE Alkesa Lestari hanya mengandalkan tenaga dan pikiran untuk mengikuti pelatihan keterampilan di KUBE dan mengikuti pelatihan tersebut.

Kedua, implementasi dalam kegiatan pendampingan. Pendampingan dilakukan agar masyarakat atau anggota dapat menjalankan perannya masing-masing secara maksimal dalam setiap kegiatan program. Tanpa pendampingan suatu program atau kegiatan dimungkinkan mengalami kegagalan karena tidak optimal dan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan semula.

Ketua dan pendamping sudah mendapat arahan dari dinas sosial terkait kegiatan, salah satunya dalam proses rekrutmen. Sehingga melalui pembekalan ini pihaknya memberikan arahan dan pendampingan kepada anggota dan calon anggota lainnya yang memang ingin bergabung dalam kegiatan ini. Bentuk partisipasi yang terjadi adalah anggota hanya mengandalkan keahlian dan tenaganya selama proses pendampingan.

Ketiga, implementasi dalam kegiatan produksi. Secara umum, kegiatan ekonomi seperti membuat, menciptakan, dan memproduksi komoditas atau jasa termasuk dalam kegiatan produksi. Secara teknis, produksi mengacu pada transformasi sumber daya yang belum selesai, atau *input*, menjadi produk jadi, atau *output*. Kita perlu mewujudkan tujuan kegiatan produksi berikut: Menghasilkan lebih banyak barang atau jasa, memenuhi permintaan konsumen, memastikan kualitas yang prima, dan meningkatkan keuntungan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap proses produksi. Sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan secara efektif tanpa pengelolaan yang baik oleh manusia. Dalam kegiatan ini tentunya membutuhkan partisipasi yang besar dari masyarakat. Seluruh anggota KUBE memberikan secara penuh apapun yang mereka miliki untuk mengembangkan usahanya terutama tenaga kerja karena sebagian besar dari mereka memiliki usaha keripik singkong dibawah naungan KUBE Alkesa Lestari.

3.3. Bentuk Partisipasi dalam Tahap Pelembagaan

Pada tahap pelembagaan, keikutsertaan anggota KUBE Alkesa Lestari dibagi menjadi tiga yaitu keikutsertaan dalam pendanaan lanjutan, penguatan kelembagaan, dan pembentukan kader.

Pertama, pendanaan awal lebih jauh. Dana awal diberikan pemerintah sebagai bentuk bantuan dana dalam program ini, dana yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat dengan 10 orang anggota berjumlah 20 juta rupiah. Adanya pendanaan lanjutan pada dasarnya untuk kepentingan masing-masing anggota dan juga programnya, sehingga sangat penting adanya pengaturan dan pelaksanaan pendanaan lanjutan.

Bentuk partisipasi lebih tepat dilakukan dengan menyetorkan hasil produksi secara berkala kepada salah satu pihak yang telah ditunjuk yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya. Hasil titipan ini menjadi dana lanjutan yang dikelola dan dikembangkan oleh masing-masing anggota KUBE untuk pembiayaan selanjutnya. Adanya simpanan ini merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam pembiayaan selanjutnya bagi KUBE dan seluruh anggotanya.

Kedua, penguatan kelembagaan. Salah satu kendala yang dapat dijumpai pada lembaga yang lemah adalah tidak adanya komunikasi antara satu dengan yang lain yang dapat mengakibatkan kehancuran dan keterpurukan bagi suatu organisasi atau kegiatan. Oleh karena itu, dalam organisasi dan kegiatan ini tentunya ada penguatan kelembagaan. Pengembangan dan penataan tugas, fungsi dan struktur organisasi yang merepresentasikan tata kelola yang efektif dan efisien, serta penyusunan rincian tugas unit kerja selain menjelaskan tugas dan fungsi unit kerja, merupakan hasil dari penguatan kelembagaan tersebut. Penguatan kelembagaan yang sistematis karena pengurus KUBE bekerja keras menghabiskan waktu dan pikirannya.

Ketiga, pembentukan regenerasi. Regenerasi atau kaderisasi berfungsi untuk menyiapkan calon (embrio atau kaderisasi) yang siap melanjutkan perjuangan organisasi. Proses kaderisasi organisasi bertanggung jawab untuk mewariskan cita-cita organisasi yang positif, menjamin kelangsungan hidup organisasi, dan menyediakan sumber daya pendidikan bagi anggota. Tanpa regenerasi suatu organisasi akan mengalami kebuntuan karena tidak ada penerus dari organisasi tersebut. Karena pada dasarnya kaderisasi dilakukan untuk kepengurusan selanjutnya dimasa yang akan datang karena kemajuan dan masa depan organisasi itu sendiri.

Dalam bentuk partisipasi pada tahap ini pengurus kube merancang dan merumuskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan di KUBE Alkesa Lestari. Anggota KUBE Alkesa Lestari berjumlah 10 orang termasuk Pengurus Harian yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Ketiga orang ini benar-benar mencurahkan waktu dan pikirannya untuk menjalankan program KUBE.

3.4. Bentuk Partisipasi dalam Tahap Monitoring dan Evaluasi

Pada umumnya monitoring dilakukan pada saat kegiatan dilakukan untuk menentukan apakah proses sudah sesuai dan hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau tidak. Jika ditemukan keterlambatan atau kejanggalan, segera diperbaiki agar operasional dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan. Akibatnya, hasil pemantauan digunakan sebagai input untuk prosedur selanjutnya. Untuk menentukan hasil akhir atau pencapaian suatu kegiatan atau program dilakukan evaluasi setelah kegiatan selesai. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk merencanakan pelaksanaan program yang sama di lokasi dan tanggal yang berbeda.

Partisipasi dalam monitoring dan evaluasi yaitu masyarakat anggota kelompok ikut serta mengevaluasi program KUBE Alkesa Lestari untuk mengetahui capaian program yang telah direncanakan sebelumnya untuk perbaikan atau penambahan pelaksanaan program berikutnya. KUBE Alkesa Lestari juga melakukan evaluasi setiap pertemuan atau meeting sebulan sekali. Evaluasi ini pada saat fasilitator KUBE akan menanyakan kepada anggota apakah ada kendala atau tidak dalam usahanya. Terkadang anggota KUBE menyempatkan diri untuk berbincang sejenak setelah beberapa bulan masa produksi. Mereka bertukar pikiran dan saling memberikan solusi bagi anggota yang mengalami kendala dalam produksinya.

3.5. Tangga Partisipasi dalam Tahap Perencanaan

Dalam proses perencanaan program KUBE, seluruh KUBE dituntut untuk akuntabel dan partisipatif dalam proses pelaksanaannya sesuai dengan mandat dari Dinas Sosial. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pemberian ide atau gagasan yang menyangkut kepentingan bersama dalam pencapaian program KUBE Alkesa Lestari. Pengambilan keputusan awal dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat kemudian memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan biasanya dengan pertemuan atau kegiatan pertemuan. Namun partisipasi yang diharapkan tidak hanya ditunjukkan dengan kehadiran anggota dalam rapat, tetapi juga dengan kesediaan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, gagasan, dan saran-saran yang bermanfaat bagi kegiatan yang direncanakan. Hal ini sebenarnya dimaksudkan agar anggota merasa memiliki andil terhadap kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan. Dalam kegiatan rapat atau rapat ini, anggota selalu diberi kesempatan oleh pimpinan rapat untuk berpartisipasi.

Masyarakat berpartisipasi dalam bentuk menghadiri forum musyawarah dan pertemuan. Namun menurut Arnstein anggota KUBE masih berada pada low level ketiga yaitu notifikasi atau sekedar notifikasi atau sosialisasi satu arah dan sebagian besar hanya mendengar dan menerima informasi perencanaan dari Dinas Sosial dan ketua KUBE masing-masing karena ada telah mendapat petunjuk teknis mengenai KUBE dari Dinas Sosial.

3.6. Tangga Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dari rencana-rencana yang telah dirintis sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Dalam pelaksanaan suatu program memiliki ruang lingkup, yang pertama adalah pengalokasian sumber daya dan dana, yang kedua adalah kegiatan administrasi dan koordinasi, dan yang ketiga adalah penjabaran program. (Dwiningrum, 2011)

Tidak dapat dipungkiri bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap hal yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan di KUBE ini. Dalam kegiatan pelatihan masyarakat berpartisipasi dengan mengikuti berbagai macam program pelatihan yang telah dibuat dan dipersiapkan. Partisipasi masyarakat dalam pelatihan ini berupa partisipasi masyarakat dalam berbagai macam sosialisasi yang disiapkan dan diselenggarakan oleh pemerintah.

Oleh karena itu bakti sosial akan mengajak anggota masyarakat yang tergabung dalam KUBE untuk mengikuti sosialisasi guna memberikan pelatihan kepada masyarakat. Pada tahap pelaksanaan ini tangga partisipasi masyarakat cukup baik karena partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KUBE dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menjadi peserta dan mengikuti kegiatan pelatihan KUBE secara rutin.

Dalam kegiatan pendampingan ini, tidak hanya pemerintah yang bertugas mendampingi jalannya kegiatan ini, namun masyarakat atau anggota juga harus dilibatkan dalam melaksanakan kegiatan pendampingan, mengingat dalam hal ini pada dasarnya mereka adalah pihak inti atau instrumen penting dalam melaksanakan kegiatan ini. Proses rekrutmen dilakukan oleh ketua KUBE beserta jajarannya dengan mengundang calon anggota sambil melihat potensi pihak-pihak yang memang layak untuk dibantu (sesuai dengan kriteria KUBE).

Setelah tahapan diatas tentunya akan ada tahapan implementasi yang dalam hal ini tahapan implementasi dilakukan pada tahapan produksi. Dalam tahapan inilah masyarakat sebagai pihak yang sangat menentukan mengambil banyak peran penting agar pelaksanaan kegiatan produksi dapat berjalan dengan optimal. Proses pelaksanaan meliputi pengecekan dana yang telah digunakan, pelaksanaan proses produksi, penghitungan hasil produksi, dan pengawasan terhadap pekerjaan seluruh anggota KUBE.

Ketua selalu mendampingi, melibatkan dan mengikutsertakan anggota dalam setiap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelembagaan dan evaluasi. Kolaborasi antar anggota bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan keterampilan bagaimana membuat produk keripik singkong unggulan dan belajar bagaimana mengelola kelompok dalam menjalankan kegiatan yang baik.

Tangga partisipasi dalam tahapan ini sepenuhnya dikuasai oleh anggota komunitas KUBE Alkesa Lestari (citizen control) karena mengikuti setiap kegiatan, seperti pelatihan, penyelesaian masalah internal, hingga kegiatan lainnya.

3.7. Tangga Partisipasi dalam Tahap Institusionalisasi

Pendanaan merupakan hal yang sangat penting karena suatu usaha atau kegiatan dapat berjalan optimal karena memiliki dana untuk mendukungnya. Pembiayaan harus diatur dengan jelas karena merupakan alat penunjang yang paling penting dalam kemajuan setiap kegiatan yang ada. Pendanaan awal diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk bantuan keuangan dalam program KUBE. Dalam KUBE ini diperlukan keikutsertaan anggota KUBE untuk menambah kekurangan dana yang dimiliki dengan tujuan untuk menguntungkan masing-masing anggota dan juga kepentingan masing-masing program.

Tanpa pelembagaan pendanaan lebih lanjut, hal ini dapat menyebabkan pendanaan program KUBE tidak teratur. Sehingga dibutuhkan kerjasama dan partisipasi semua anggota dalam menangani pelembagaan ini. Hal ini memberikan dampak yang sangat positif bagi pengelolaan dana selanjutnya yang dimiliki oleh KUBE Alkesa Lestari.

Dalam suatu program, kegiatan, atau organisasi diperlukan penguatan kelembagaan agar program yang dilaksanakan dapat mencapai tujuannya. Salah satu kendala yang dapat dijumpai pada lembaga yang lemah adalah tidak adanya komunikasi antara satu dengan yang lain yang dapat mengakibatkan kehancuran dan keterpurukan bagi suatu organisasi atau kegiatan. Oleh karena itu dalam program tersebut harus ada pembinaan dan pengaturan tugas, fungsi dan struktur organisasi yang mencerminkan tata kelola yang efektif dan efisien, serta penyusunan rincian tugas satuan kerja disamping menjelaskan tugas dan fungsi satuan kerja.

Dalam suatu manajemen, setiap individu memiliki tugas dan peran masing-masing. Institusionalisasi merupakan proses lanjutan dimana anggota KUBE Alkesa Lestari memiliki kebebasan untuk memanfaatkan usahanya dengan sebaik-baiknya. Semua anggota memiliki kewajiban untuk memantau produksi mereka dan memastikan implementasi dan pelembagaan telah tercapai sesuai target, rencana dan jadwal.

Pembentukan kader sangat krusial. Kader adalah sumber daya manusia yang telah dilatih dan dipersiapkan melalui prosedur yang cermat. Regenerasi adalah nama lain dari proses pemilu. Regenerasi berfungsi untuk melanjutkan program yang telah berjalan dengan calon anggota yang berkompeten. Proses penciptaan kader bertanggung jawab untuk mewariskan cita-cita organisasi yang positif.

Dalam proses pelebagaan, sebagian besar hanya BPH yang selalu aktif dalam mengambil berbagai keputusan dan merumuskan kebijakan. Anggota lain hanya fokus pada produksi mereka sendiri. Menurut tangga partisipasi Arnstein, dalam proses pelebagaan ini KUBE Alkesa Lestari berada pada level pendelegasian wewenang karena hanya beberapa orang yang memiliki kewenangan di KUBE yang aktif dalam melaksanakan dan mengelola kebijakan program.

3.8. Tangga Partisipasi dalam Tahap Monitoring dan Evaluasi

Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau ada penyimpangan. Kita dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan secara keseluruhan sehingga perlu adanya monitoring dan evaluasi secara terus menerus. (Dwiningrum, 2011)

KUBE Alkesa Lestari juga melakukan evaluasi setiap pertemuan atau meeting sebulan sekali. Ada dua jenis evaluasi di KUBE Alkesa Lestari, yaitu evaluasi nonformal dan evaluasi formal. Evaluasi nonformal merupakan evaluasi yang dilakukan oleh ketua KUBE Alkesa Lestari bersama pendamping. Dalam evaluasi ini asisten dan ketua akan menanyakan kepada anggota pada setiap rapat apakah ada kendala atau tidak dalam usahanya.

Pengawasan dan evaluasi formal, dilakukan oleh Dinas Sosial. Perwakilan dari Dinas Sosial akan mendatangi setiap anggota KUBE untuk mengevaluasi hasil laporan yang telah dibuat oleh KUBE. Dinas Sosial akan mengaudit data KUBE dua kali dalam setahun. Namun pada tahun ketiga, Dinas Sosial tidak lagi secara langsung melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap KUBE. Hanya pendamping yang masih memeriksa laporan.

Anggota KUBE Alkesa Lestari tidak langsung mengikuti evaluasi karena hanya dapat dilakukan oleh ketua dan instansi terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Anggota komunitas KUBE tidak terlibat dalam evaluasi program tetapi berpartisipasi dalam kegiatan pelaporan yang dilakukan dan juga hadir ketika ada rapat evaluasi. Menurut jenjang partisipasi Arnstein, pada tahap *monitoring* dan evaluasi, KUBE Alkesa Lestari berada pada level kemitraan karena hanya pengelola program atau yang membuat program yang dapat menilainya karena Dinas Sosial sebagai pemegang kewenangan mengharapkan timbal balik dari program-program yang mereka buat.

4. KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan cukup optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari cukup banyaknya anggota dalam menghadiri forum musyawarah, rapat, atau sosialisasi dari dinas sosial. Bentuk partisipasi anggota KUBE Alkesa Lestari berupa pikiran, ide dan gagasan, keahlian, barang, dan uang. Tangga partisipasi dalam tahap pelaksanaan di KUBE Alkesa Lestari masih dalam tingkatan rendah ketiga, yaitu pemberitahuan (*informing*). Saat mulai masuk level *informing*, pemerintah berkuasa tidak menghalangi partisipasi.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, anggota KUBE Alkesa Lestari sudah cukup baik. Seluruh anggota menyumbangkan pikiran, tenaga, barang, dan uang mereka untuk mengembangkan usaha mereka masing-masing. Tidak ada campur tangan dari pihak manapun dalam kegiatan pelaksanaan ini. Tangga partisipasi dalam pelaksanaan bagian kegiatan pelatihan dan pendampingan, yaitu level *delegated power* (pendelegasian kekuasaan) dan *citizen control* (kontrol masyarakat).

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelebagaan di KUBE Alkesa Lestari, meliputi pendanaan lebih lanjut, penguatan kelembagaan, dan pembentukan kaderisasi sudah sangat baik karena terjalin komunikasi dan hubungan yang sangat baik antara anggota dengan ketua. Namun, dalam proses kelembagaan, sebagian besar memang hanya BPH yang selalu aktif meluangkan waktu dan pikiran dalam penyusunan kebijakan. Tangga partisipasi dalam tahap pelebagaan ini adalah *delegated power* (pendelegasian kekuasaan).

Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi anggota KUBE Alkesa Lestari hanya menghadiri rapat setiap evaluasi. Masyarakat belum dilibatkan dalam proses monitoring dan evaluasi karena kegiatan pelaporan dan realisasi program dilakukan oleh ketua KUBE Alkesa Lestari yang langsung diaudit oleh Dinas Sosial terkait. Tangga partisipasi pada tahap ini mencapai level *partnership* (kemitraan) di mana pada level ini terbentuknya kerjasama antara beberapa pihak dalam merumuskan atau melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan program yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik / Suharsimi Arikunto*. Rineka Cipta.

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Rineka Cipta.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat : studi kasus Daerah Istimewa Yogyakarta / Ardito Bhinadi*. Deepublish.
- Chambers, R. (2018). Ideas for Development. *Open Journal of Social Sciences*, 6, 12.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan/ Siti Irene Astuti Dwiningrum*. Pustaka Pelajar.
- Hermansyah, T. (2016). *Memberdayakan masyarakat dengan mengaplikasikan pendekatan transformasi-komunitas-institusionalisasi : buku rintisan membangun dan mengembangkan teori pemberdayaan berbasis konteks masyarakat indonesia / Dr.Tantan Hermansah, M.Si*. UIN Jakarta Press.
- Moloeng, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi suatu pengantar (P. R. Grafindo (ed.))*.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama.
- Sukmadinata, N. S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.